

# ANALISIS PENGELUARAN BIAYA TENAGA KERJA USAHA MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2024

Elvarel Naufal Krisna<sup>1</sup>, Yusi Andini<sup>2</sup>, Muhammad Ridwan<sup>3</sup>, Muhammad Ihsan Ashari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Sistem Informasi  
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang,  
Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

\*E-mail: [elfarel.krisna82@gmail.com](mailto:elfarel.krisna82@gmail.com)<sup>1</sup>, [yusiandini5@gmail.com](mailto:yusiandini5@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mridwan070404@gmail.com](mailto:mridwan070404@gmail.com)<sup>3</sup>, [dosen03154@unpam.ac.id](mailto:dosen03154@unpam.ac.id)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

**ANALISIS PENGELUARAN BIAYA TENAGA KERJA USAHA MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2024.** Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam men-ciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian di tingkat regional. Keberagaman kondisi geografis dan sosial ekonomi antar wilayah menyebabkan adanya perbedaan dalam pengeluaran biaya tenaga kerja UMK di setiap provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola serta disparitas pengeluaran biaya tenaga kerja UMK antar provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif berbasis Business Intelligence dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Visualisasi data dilakukan melalui berbagai bentuk grafik, antara lain diagram batang, diagram lingkaran, diagram batang berkelompok, heatmap, dan bubble chart. Hasil kajian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mencatat pengeluaran biaya tenaga kerja UMK tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, provinsi di luar Pulau Jawa cenderung memiliki tingkat pengeluaran yang lebih rendah. Secara umum, struktur biaya antara usaha mikro dan usaha kecil relatif seimbang, meskipun usaha mikro menunjukkan kontribusi yang lebih dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan yang lebih terfokus guna meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja serta mendorong pemerataan pengembangan UMK antar wilayah.

**Kata kunci:** UMK, biaya tenaga kerja, Business Intelligence, BPS, analisis provinsi.

## ABSTRACT

**ANALYSIS OF LABOR EXPENDITURE OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN INDONESIA BY PROVINCE IN 2024.** Micro and Small Enterprises (MSEs) play a strategic role in Indonesia's economy, particularly in creating employment opportunities and driving regional economic activity. Variations in geographical and socioeconomic conditions across regions lead to differences in labor cost expenditures of MSEs among provinces. This study aims to examine the patterns and disparities of MSE labor cost expenditures across Indonesian provinces in 2024. The research adopts a quantitative descriptive approach based on Business Intelligence, utilizing secondary data sourced from Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik). Data visualization is presented through various graphical forms, including bar charts, pie charts, grouped bar charts, heatmaps, and bubble charts. The findings indicate that provinces on the island of Jawa especially West Java, Central Java, and East Java record the highest MSE labor cost expenditures compared to other regions. In contrast, provinces outside Java tend to have lower expenditure levels. Overall, the cost structure between micro and small enterprises is relatively balanced, although micro enterprises show a more dominant contribution. These findings underscore the importance of more targeted policy formulation to improve labor cost efficiency and promote more equitable development of MSEs across regions.

**Keywords:** MSEs, labor costs, Business Intelligence, Statistics Indonesia (BPS), provincial analysis.

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah. UMK dikenal sebagai sektor padat karya yang mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang beragam, sehingga berperan penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia[1], [2].

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, UMK sangat bergantung pada tenaga kerja sebagai faktor produksi utama. Salah satu komponen biaya terbesar yang harus ditanggung pelaku UMK adalah biaya tenaga kerja, yang mencakup upah dan kompensasi lainnya[3]. Tingginya proporsi biaya tenaga kerja menjadikan UMK sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan, biaya hidup, dan dinamika pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha dan kemampuan UMK dalam menyerap tenaga kerja[4].

Pengeluaran biaya tenaga kerja UMK menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah di Indonesia. Provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung memiliki pengeluaran biaya tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan skala ekonomi yang lebih kecil. Perbedaan ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, tingkat upah minimum regional, serta produktivitas tenaga kerja di masing-masing provinsi[5].

Seiring berkembangnya teknologi informasi, pendekatan *Business Intelligence* (BI) semakin banyak digunakan dalam analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. BI memungkinkan proses pengolahan dan visualisasi data secara sistematis sehingga pola dan perbedaan pengeluaran biaya tenaga kerja UMK dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengeluaran biaya tenaga kerja UMK per provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan *Business Intelligence*[6], [7].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan unit usaha produktif yang berperan penting dalam

struktur perekonomian Indonesia. UMK umumnya dikelola secara mandiri dengan keterbatasan modal, teknologi, serta sumber daya manusia, namun memiliki karakteristik fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. Keberadaan UMK tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi daerah. Meskipun demikian, UMK masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan skala usaha dan akses terhadap teknologi[8], [9].

Biaya tenaga kerja merupakan komponen utama dalam struktur biaya UMK. Pada usaha mikro, biaya tenaga kerja cenderung mendominasi biaya operasional karena rendahnya tingkat mekanisasi dan otomatisasi. Sementara itu, usaha kecil umumnya memiliki sistem kerja yang lebih terorganisir, meskipun peningkatan skala usaha tidak selalu diikuti oleh peningkatan efisiensi biaya secara signifikan.

Perbedaan pengeluaran biaya tenaga kerja antar provinsi mencerminkan ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Provinsi dengan pusat aktivitas ekonomi dan jumlah UMK yang besar cenderung memiliki pengeluaran biaya tenaga kerja yang tinggi, sedangkan wilayah lain menunjukkan nilai yang lebih rendah. Ketimpangan ini menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi nasional[10].

Perbedaan pengeluaran biaya tenaga kerja antar provinsi mencerminkan ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Provinsi dengan pusat aktivitas ekonomi dan jumlah UMK yang besar cenderung memiliki pengeluaran biaya tenaga kerja yang tinggi, sedangkan wilayah lain menunjukkan nilai yang lebih rendah. Ketimpangan ini menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi nasional[11].

*Business Intelligence* (BI) merupakan pendekatan analisis data yang mengintegrasikan pengolahan data, visualisasi, dan interpretasi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks UMK, BI digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perbedaan biaya tenaga kerja secara komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan berbasis data[12], [13].

## 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengeluaran biaya tenaga kerja

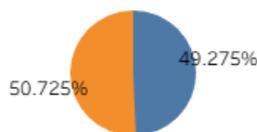
Usaha Mikro dan Kecil per provinsi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi data secara objektif melalui analisis numerik dan visualisasi, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Data tersebut mencakup informasi pengeluaran biaya tenaga kerja usaha mikro dan usaha kecil di seluruh provinsi di Indonesia. Penggunaan data BPS dipilih karena memiliki tingkat keandalan dan validitas yang tinggi dalam penelitian ekonomi[14].

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pembersihan data, pengelompokan berdasarkan provinsi dan jenis usaha, serta analisis deskriptif. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Business Intelligence dengan berbagai teknik visualisasi untuk mengungkap pola dan perbedaan biaya tenaga kerja UMK[15].

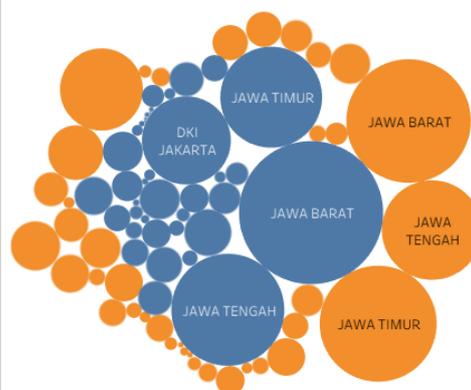
Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik dan uraian deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap hasil penelitian serta mendukung interpretasi akademik terhadap temuan yang diperoleh

### Proporsi Pengeluaran Mikro vs Kecil

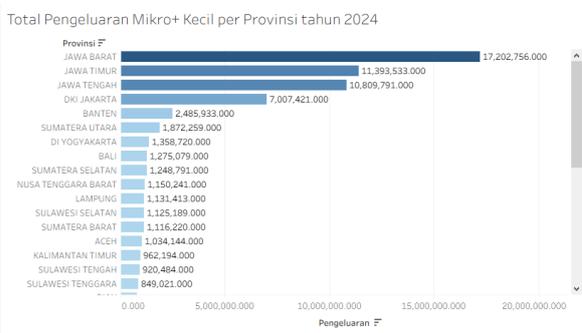


Gambar 3. Proporsi Pengeluaran Biaya Mikro Vs Kecil

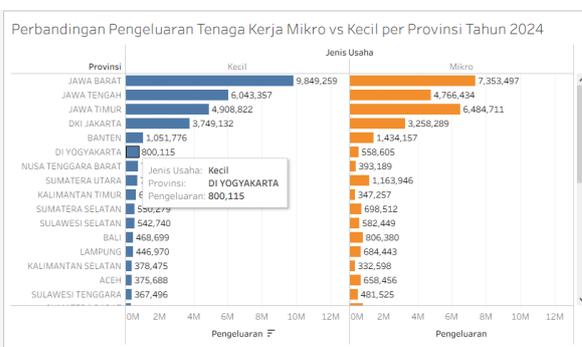
### Besaran Pengeluaran per Provinsi



Gambar 4. Besaran Pengeluaran per Provinsi



Gambar 1. Total Pengeluaran Mikro dan Kecil per Provinsi Tahun 2024



Gambar 2. Perbandingan Pengeluaran Biaya Tenaga Kerja

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengeluaran biaya tenaga kerja UMK antar provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mencatat pengeluaran biaya tenaga kerja tertinggi. Hal ini mencerminkan tingginya konsentrasi UMK dan intensitas aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Sebaliknya, provinsi di luar Pulau Jawa menunjukkan tingkat pengeluaran biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menggambarkan skala UMK yang lebih kecil serta aktivitas ekonomi yang belum seintensif wilayah Jawa. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Dari sisi komposisi, pengeluaran biaya tenaga kerja usaha mikro sedikit lebih besar dibandingkan usaha kecil. Perbedaan yang relatif tipis menunjukkan bahwa struktur biaya antara kedua jenis usaha cukup seimbang, meskipun usaha mikro masih menghadapi tantangan efisiensi operasional.

Pendekatan *Business Intelligence* yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam mengungkap pola dan intensitas pengeluaran biaya tenaga kerja UMK. Visualisasi data membantu memperjelas perbedaan antar provinsi dan antar jenis usaha, sehingga hasil penelitian ini relevan sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis data.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran biaya tenaga kerja Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan antar provinsi. Provinsi di Pulau Jawa memiliki pengeluaran biaya tenaga kerja UMK yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, yang mencerminkan tingginya konsentrasi UMK dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Komposisi biaya tenaga kerja menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki pengeluaran yang sedikit lebih besar dibandingkan usaha kecil. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar, kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan efisiensi pada usaha mikro, terutama dalam pengelolaan tenaga kerja.

Pendekatan *Business Intelligence* memberikan kontribusi penting dalam menganalisis dan menyajikan data pengeluaran biaya tenaga kerja UMK secara visual dan sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMK yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemerataan pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. P. Riadina and Sugianto, "Jurnal of Development Economic and Digitalization," *Anal. Pengaruh Indik. Kebijakan. Monet. Terhadap Tingkat Inflasi Di Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2024.
- [2] R. S. A. najasyi Qausar, "Journal Of Development Economic and Digitalization," *J. Dev. Econ. Digit.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [3] K. et al 2023, "No Title 濟無 No Title No Title No Title," vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [4] D. C. Pangestuti, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen," *J. Mitra Manaj.*, vol. 3, no. 11, pp. 1055–1072, 2019, doi: 10.52160/ejmm.v3i11.294.
- [5] A. Primadewi, T. A. Purnomo, and D. Sasongko, "Analisa Perancangan Sistem Pengelolaan Data UMKM berdasarkan Business Intelligence Development Model Framework," *J. Sist. Komput. dan Inform.*, vol. 3, no. 2, p. 209, 2021, doi: 10.30865/json.v3i2.3587.
- [6] L. T. Laut, A. S. Putri, and Y. Septiani, "7781-20044-1-Sm," *J. Manag. Bus.*, vol. 3, no. 2, pp. 21–34, 2020.
- [7] A. Lim, A. Wolvinson, C. Cerina, R. Wibowo, and S. Chen, "Analisis Pendapatan Regional Wilayah Jawa Tengah Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (2010-2020)," *J. Sos. Teknol.*, vol. 1, no. 6, pp. 465–471, 2021, doi: 10.36418/journalsostech.v1i6.109.
- [8] D. I. Widyapangesti and A. Soelistyo, "Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa," *J. Ilmu Ekon. JIE*, vol. 6, no. 1, pp. 123–133, 2022, doi: 10.22219/jie.v6i1.19128.
- [9] L. M. Muhamad Wisnu Alfiansyah, I Nyoman Switrayana, "Peran Buisness Intelligence dalam Meningkatkan Kinerja UMKM," vol. 2024, pp. 13–19, 2024.
- [10] N. Mahasiswa and P. Studi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah Tenaga Kerja Di Indonesia," 2017.

- [11] T. A. N. Azwa Ferdiansya, Putinisa Aulia, "Peran Visualisasi Data Untuk Menunjang Analisis Data Kependudukan Di Provinsi Jambi the Role of Data Visualization To Support Analysis of Population," *PENTAHHELIX J. Adm. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 155–164, 2024.
- [12] Muhammad Riza Falefi and Bambang Dwi Waryanto, "Analisis Perbandingan Antara Pendapatan Driver Gojek Fulltime Dan Upah Minimum Regional Kota Surabaya," *J. Sustain. Bussiness Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 516–523, 2020, doi: 10.36456/jsbr.v1i1.3029.
- [13] F. K. Senduk, R. Waluyo, and K. N. Isnaini, "Data Analysis using Business Intelligence and Tableau for Visualizing Indonesia's Poverty Line," *Sistemasi*, vol. 14, no. 3, p. 1122, 2025, doi: 10.32520/stmsi.v14i3.4993.
- [14] Lustantri Mendrofa, Bowoaro Zandrato, and Iperusman Zai, "Pengaruh Digitalisasi Pada Peningkatan Efisiensi Operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia Tahun 2023," *IDENTIK J. Ilmu Ekon. Pendidik. dan Tek.*, vol. 2, no. 1, pp. 100–108, 2025.
- [15] D. S. Pratomo and P. M. A. Saputra, "108-Article Text-242-1-10-20120516," *J. Indones. Appl. Econ.*, vol. 5, pp. 269–284, 2011.